

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : RajaGrafindo

Andi Hamzah, 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

Azis Syamsudin, 2013. *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ke-3.

Barda Nawawi Arief, 2009. *ARUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana*, Cetakan-4, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

_____, 2010. *Kebijakan Hukum Pidana: perkembangan Penyusunan Konsep Baru*, Jakarta: Prenada Media Group

Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2009, *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Refika Aditama.

Edi Setiadi dan Dian Andriasari, 2013. *Perkembangan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Graha Ilmu

Elwi Danil, 2011. *Korupsi : Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Jakarta: Raja Grafindo

Ermansjah Djaja, 2010. *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi : Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV-2006*, Jakarta: Sinar Grafika.

H.Zainuddin Ali, 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2005. *Tinjauan Umum Terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional*, Jakarta: ELSAM

Lilik Mulyadi, 2007. *Tindak Pidana Korupsi Indonesia: Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Bandung: Alumni.

_____, .2008. *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Bandung: Alumni

- ICW, 2014. *Hasil Penelitian Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: ICW
- I.S Heru Pratama, 2007. *Politik Kriminal*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya
- Jeremy Pope, 2007. *Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- M.Ali Zaidan, 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika
- Mansyur Semma, 2008. *Negara dan Korupsi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Marwan Effendy, 2014. *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Jakarta: Referensi
- Mien Rukmini, 2014. *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Bandung: P.T. Alumni, Cetakan Ketiga.
- Neng Sarmida, Aria Zurnetti dan Nilma Suryani, *Bahan Ajar Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Andalas
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional
- Ruslan Renggong, 2016. *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Prenamadia Group
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Lektor Mahasiswa, Bagian satu
- Shinta Agustina, 2014. *Asas Lex Specialis Derogat Legi Lex Generali dalam Penegakan Hukum Pidana*, Depok: Themis Books
- Soedarto, 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers
- Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, 2011. *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Jakarta: RajaGrafindo
- Tim Advokasi dan Pembaharuan Hukum KPK, Tim Pengkaji Fakultas Hukum Universitas Khatolik Parahyangan, 2014. *Anotasi Delik Korupsi dan Delik Lainnya Yang Berkaitan Dengan Delik Korupsi Dalam Rancangan*

Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi

Tim Kompedium, 2011. *Kompedium Hukum Pidana (Review RUU KUHP)*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Tim Naskah Akademik, 2012. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI

II. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP)

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RUU KUHP)

III. Jurnal, Makalah dan Artikel

Alvi Syahrin, *Perumusan Delik Korupsi Dalam RUU KUHP dan Pengaruhnya Terhadap Lembaga Penegak Hukum*.

Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Peraturan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Bahan-1 Pelatihan Hakim Militer di Surabaya pada Tahun 2013

Ida Bagus Ketut Weda, *Korupsi Dalam Patologi Sosial: Sebab, Akibat dan Penanganannya untuk Pembangunan di Indonesia*

Mahmud Mulyadi, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Lain Yang Terkait Tindak Pidana Korupsi Dalam RUU KUHP dan Implikasinya Terhadap Kewenangan Penyidikan dan Penuntutan*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Majalah Parlementaria, *Revisi UU KUHP Sebaiknya Dilengkapi Pasal Pengaman*, Edisi 129 TH.XLV, 2015.

Mudzakkir, *Model dan Kebijakan Kodifikasi Serta Perumusan Delik Korupsi Dalam RUU KUHP*. Disampaikan pada *Forum Group Discussion (FGD)* yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Hotel Grand Cokro, Yogyakarta, 08 Oktober 2013

Pujiyono yang berjudul *Model dan Kebijakan Kodifikasi dan Perumusan Delik Korupsi Dalam RUU KUHP*, Bahan Persentasi *Focus Group Discussion*, “*Menyoal Pengaturan Delik Korupsi Dalam RUU KUHP dan Implikasi Terhadap Praktik Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*”, Medan, Grand Swiss-Belhotel, 1 Oktober 2013.

Shinta Agustina, *Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kerangka Pembaruan Hukum Pidana*, Disampaikan dalam Kegiatan Review RUU KUHP dan Upaya Pemberantasan Korupsi, diselenggarakan oleh ICW, Jakarta, 2 Februari 2015

Syaputra, *Implikasi Perumusan Delik Korupsi di Dalam Kebijakan Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 9 No. 3, Juli-September 2015,

Trisno Raharjo, *Potensi Masalah Perumusan Delik Pidana Korupsi dalam RUU KUHP*, Disampaikan dalam FGD Diskusi Terbatas Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Selasa 8 Oktober 2013, Hotel Grand Tjokoro, Yogyakarta.

IV. Website

www.transparency.org/cpi2014/results yang diakses pada pukul 23.05 WIB tanggal 5 Oktober 2015.

www.asiarisk.com/subscribe/dataindex.html yang diakses pada pukul 23.15 WIB tanggal 5 Oktober 2015.

www.kbbi.web.id.html diakses pada tanggal 25 Januari 2016

www.reformasikuhp.org diakses pada tanggal 25 Januari 2016

<http://m.tribunnews.com/nasional/2014/12/25/sejak-otonomi-daerah-70-persen-kepala-dan-wakil-kepala-daerah-terjerat-korupsi> diakses pada 24 Januari 2015 pukul 22.10 WIB

<http://www.mediaindonesia.com/misiang/read/3579/Mengendalikan->

[Pemberantasan-Korupsi/2015/09/20](#) diakses pada tanggal 24 Januari 2016 pukul 23.15

Koran Kompas “ICW:Delik Korupsi dalam RUU KUHP akan Mengebiri Kewenangan KPK” 13 September 2015

Okezone.com, *RUU KUHP, Menkumham Ngotot Masukkan Delik Korupsi*, Jumat, 18 September 2015. Diakses pada tanggal 10 Mei 2016 pukul 11.00 WIB

